

TESIS

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PT JIWASRAYA
(PERSERO) TERHADAP KLAIM POLIS *PROVEST SAVING PLAN*
(Studi Putusan Nomor 05/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Magister Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Magister Hukum*

Oleh :



Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.Hum
Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PT JIWASRAYA
(PERSERO) TERHADAP KLAIM POLIS *PROVEST SAVING PLAN* (STUDI
PUTUSAN NOMOR 05/PDT.G.S/2021/PN.JKT.PST)**

ABSTRAK

Kasus gagal bayar klaim produk *Provest Saving Plan (JS Saving Plan)* oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menjadi persoalan hukum yang serius, mengingat produk *bancassurance* tersebut menawarkan janji imbal hasil pasti kepada nasabah namun pada praktiknya tidak dapat direalisasikan, sehingga menimbulkan kerugian signifikan baik bagi pemegang polis maupun keuangan negara. Persoalan ini melahirkan dua putusan pengadilan dengan jalur prosedural berbeda dan amar yang saling bertentangan, yakni Putusan Nomor 05/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst yang diperiksa melalui mekanisme gugatan sederhana dengan dasar wanprestasi, serta Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst yang diperiksa melalui gugatan biasa dengan dasar perbuatan melawan hukum. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua rumusan masalah, bentuk pertanggungjawaban hukum PT Asuransi Jiwasraya terhadap pemegang polis *Provest Saving Plan*, serta dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus kedua perkara yang bersangkutan. Kajian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan mengandalkan bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan regulasi terkait, didukung bahan hukum sekunder dari kepustakaan dan pandangan para ahli. Hasil kajian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum Jiwasraya bersifat berlapis, mencakup aspek perdata (kewajiban membayar klaim, nilai tunai, dan imbal hasil berdasarkan tanggung jawab kontraktual maupun tanggung jawab mutlak), aspek pidana (tanggung jawab individual direksi yang mengabaikan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik), serta aspek administratif oleh OJK hingga pencabutan izin usaha. Disparitas putusan hakim ditemukan bersumber dari perbedaan penafsiran kata “dapat” dalam klausul penyelesaian sengketa polis ditafsirkan fakultatif pada putusan pertama sehingga gugatan dikabulkan, namun ditafsirkan sebagai kewajiban prosedural pada putusan kedua sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Penelitian menyimpulkan perlunya standar penafsiran klausul yang konsisten demi kepastian hukum dan perlindungan pemegang polis.

Kata kunci: Tanggung Jawab Hukum, Wanprestasi, Gagal Bayar.

**JUDICIAL LEGAL REASONING IN THE RULINGS ON PT JIWASRAYA
(PERSERO) REGARDING PROVEST SAVING PLAN POLICY CLAIMS**

(A Study of Decision Number 05/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst)

ABSTRACT

The default in claim payments for the Provest Saving Plan (JS Saving Plan) product by PT Asuransi Jiwasraya (Persero) constitutes a serious legal issue, given that this bancassurance product offered customers a guaranteed return but in practice could not be realized, thereby causing significant losses to both policyholders and state finances. This matter gave rise to two court decisions rendered through different procedural channels with mutually contradictory verdicts, namely Decision Number 05/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst, examined through the simple lawsuit (*gugatan sederhana*) mechanism on the basis of default (*wanprestasi*), and Decision Number 759/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst, examined through an ordinary lawsuit on the basis of unlawful act (*perbuatan melawan hukum*). Proceeding from these circumstances, this study seeks to address two research questions: the form of PT Asuransi Jiwasraya's legal liability toward Provest Saving Plan policyholders, and the legal reasoning underlying the judges' rulings in deciding the two respective cases. The study employs a normative juridical method through a statutory approach and a case approach, relying on primary legal materials in the form of court decisions and related regulations, supported by secondary legal materials drawn from the literature and the views of experts. The findings indicate that Jiwasraya's legal liability is multilayered, encompassing civil aspects (the obligation to pay claims, cash value, and returns based on both contractual liability and strict liability), criminal aspects (the individual liability of the board of directors who disregarded the principles of prudence and good corporate governance), and administrative aspects imposed by the OJK, up to the revocation of its business license. The disparity between the judges' decisions was found to stem from differing interpretations of the word "may" (*dapat*) in the policy's dispute resolution clause interpreted as facultative in the first decision, resulting in the lawsuit being granted, but interpreted as a procedural obligation in the second decision, resulting in the lawsuit being declared inadmissible (*niet ontvankelijk verklaard*). The study concludes that a consistent standard for interpreting such clauses is necessary in order to ensure legal certainty and the protection of policyholders.

Keywords: Legal Liability, Default, Payment Default.